

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, (Jakarta, PT Intermesa, Cetakan Pertama, 1977)
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (analitis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya)*, (Jakarta: UI-Press, 1995).
- Baker, Nancy V., *Conflicting Loyalties: Law and Politics in the Attorney General's Office, 1789-1990*, (Lawrance, Kansas: University Press of Kansas., 1992)
- Dinar, Syaiful Ahmad, *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, (Jakarta: Cintya Press: 2012)
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Efendi, Marwan, *Kejaksaan dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005)
- Efendi, Marwan, *Kejaksaan RI*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Penterjemah Wisnu Basuki)*, (Jakarta: Tata Nusa, 2001).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar. Grafika, 2001)
- , *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta, bakti adiyaksa, 2000).
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta; Universitas Indonesia: 1992)
- Jennings, Sir Ivon, *The Law and the Constitutions*, (London: The English Language Book, 1956)
- Locke, John, *Two Treatises of Government, New Edition*, (London: Everyman, 1993)

- Lukman, Marcus, *Eksistensi Peraturan Kelembagaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1996)
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011)
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 1999)
- , *Kewenangan Hukum Penyelenggara Negara*, (Bandung: Eresco: 1995)
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana. 2005)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia: 1988)
- Morrison, *Hukum Tata Negara Di Era Reformasi*, (Jakarta; Ramdina Prakarsa)
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta; Bulan Bintang : 1992)
- Mustafa, Bachsan, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni: 1995)
- Panitia Penyusun/Peyempurna, *Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: tanpa penerbit, 1985)
- Poerbopranoto, Koentjoro, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi, Cet. 3*, (Bandung: PT Eresco, 1978)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1973)
- Reksodiputro, Mardjono, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1997)
- Rochmawan. *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Gunung Agung: 1992)
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajawali: 1986)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994)

Soekanto Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajawali: 1986).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Pers: 1990)

Soerya, Cristina, *et. al. Kedudukan Kejaksaan Agung Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2001).

Sukandini, Chairil, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta; Grafitty Press; 1991) hlm 52

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Esekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, (Malang: UMM Pres, 2003)

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik (Pinsip-prinsip moral dasar kenegaran modern)*, Cet. 7., (Jakarta, PT Gramedia, 2003)

Surachman RM. dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Surahman RM., *Mozaik Hukum I: 30 Bahasab Terpilih*, (Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., 1996)

Tim Taskforce, *Naskah Akademis & Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetak Pertama*, (Jakarta, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2008)

### **Kamus**

Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad., *Kamus Umum Bahasa. Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

### **Disertasi/Jurnal/Makalah/Seminar**

Amanwinata, Rukmana, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, (Bandung, PPS Universitas Padjajaran, Bandung, 1996)

Governance Audit of the Public Prosecution Service, *Memperbaiki Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia: fokus pada kepentingan umum*, (makalah diskusi workshop Governance Audit of the Public Prosecution Service di dukung oleh Bank Pembangunan Asia, Yogyakarta 21-22 Februari 2001).

- Hamzah, Andi, *Konsep dan Strategi pembaharuan Kejaksaan Republik Indonesia*, (makalah disampaikan pada Workshop Governmence Audit of The Public Prosecutor Servive, Bali 21-22 Februari 2001)
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa catatan Awal*, (Jakarta, Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000)
- Luhulima, James, *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa peristiwa terkait*, (Jakarta, Kompas, 2001)
- Magill, M. Elizabeth, *Beyond Powers and Branches in Separation of Powers Law*, (University of Pennsylv Law Review, Working Paper No. 01-10, 2001)
- Manan, Bagir, *Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, No. 1*, (Bandung, Pusat Penelitian Bidang Hukum, Unpad, 1999)
- Palmer, Robert, *The Confrontation of the Legislative and Excecutive Branches: An Examination of the Constitutional Balance of Power and the Role of the Attorney General*”, Pepperdine Law Review, Vol. 11 (January, 1984).
- Štefan, Beneč, *Independence of Prosecution* (makalah disampaikan dalam Seminar “The prosecutor’s office in a democratic and constitutional state” organized by The General Prosecutor’s Office and the Slovak National Supporting Committee of Europe 2000, 25 April 2003 – 27 April 2003)
- Suhadibroto, *Rekruturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman* (makalah disampaikan dalam diskusi panel tentang profil Kejaksaan di Era Reformasi dan Globalisasi, di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 11-12 Januari 199)

### **Internet**

- Annex IX. “The Reform of the Prosecutor’s Office” <[www.supremecourt.ge/english/Annex9.pdf](http://www.supremecourt.ge/english/Annex9.pdf) – 45k>, diakses 14 Agustus 2015.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch. Hukumonline, “Beberapa Catatan Atas UU Kejaksaan Yang Baru”, <<http://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>>, diunduh tanggal 9 Agustus 2015.

Indonesia Corruption Watch, Tolak Monopoli Kewenangan Penuntutan di Kejaksaan Agung, <http://www.antikorupsi.org>, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2015

Pengantar Reformasi: *Dismantling the Old Regime, and Reconstructing the New Indonesia*; <<http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Perspektif/pengantarref.htm>>; diunduh pada tanggal 9 Agustus 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang kejaksaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang UU No.7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Peraturan Pemerintah. Nomor 2 Tahun 1945. Tentang. Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah